

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma pustaka, 2014.

_____. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Internasional IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA. 2004.

Kumar, Ranjit. *Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners*. Melbourne: Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, 1999.

Kusnardi, Moh. & Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1988.

Maridjan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Cetakan keempat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-7, (Jakarta: Prenada Media, 2011)

Mayo, Hendry B. *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, 1960.

MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Merryam, John Henry. *The civil Law Tradition; An Introduction to the legal System of Western Europe and Latin America*, California: Stanford University Press, 1969.

Minan, Ahsanul. *Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyadi, Dedi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Noer, Deliar. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Pamudhi, S. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional, Suatu Analisis di bidang Politik dan Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Petalolo, Ratna Dewi, dkk, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta: Bawaslu RI, 2020.

Rais, M. Amien. *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Rousseau, J.J. *The Social Contract and Discourses*, translated by G.D.H. Cole, J.M. Dent & Lons Ltd, 1991.

Santoso, Topo, dkk., *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Siregar, Fritz Edward. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Smith, Brian C. *Decentralization: the Territorial Dimension of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985.

Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: UGM, 2014.

Surbakti, Ramlan, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Thaib, Dahlan Thaib. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Vlies, I.C Van der. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Alih Bahasa: Linus Doludjawa, Jakarta: Ditjend Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Wirangapati, Suganda, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 1992.

Jurnal dan Tesis:

Chandra, Hanjaya. *Penanganan Perkara Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Sistem Peradilan Pidana, Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Delmana, Lati Praja, dkk, "Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Mei 2020.

Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (System For The Crime of Election)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Huda, H.M. Dimiyati, dkk. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri," *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, Volume 7 Nomor 2, Mei 2022.

Nasir, Iqbal. "Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan," *Khazanah Hukum*, 2020, Vol.2 No 1.

Surahman, dkk, "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 3 Tahun 2023, hlm, 1005.

Syafrizal, dkk, "Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Otentik Law Jurnal*, 2023, Vol. 1 No.1.

Laporan:

Bawaslu RI, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta: Bawaslu RI, 2021.

Bawaslu Kabupaten Bantul, *Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020*. Bantul, 2020.

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, *Laporan tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020*, Gunungkidul: 2020.

Bawaslu Kabupaten Sleman, *Laporan tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020*, Sleman, 2020.

Website:

[Bawaslu RI Ungkap Jumlah Dugaan Pelanggaran Sepanjang Pilkada 2018 \(tirtoid\)](https://tirtoid.id)

<https://www.tempo.co/pemilu/simak-daftar-provinsi-kabupaten-dan-kota-yang-menggelar-pilkada-serentak-2024-89680>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Nomor MK No 5/PUU-V/2007

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 01/NKB/BAWASLU/I/2013 Nomor: B/ 2/1/2013 Nomor: KEP-005/A/JA/01/ 2013 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020; Nomor: 1 Tahun 2020; Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Surat Bawaslu RI No. S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020.

Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020.

Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. hlm 16-17.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.